

BAB I

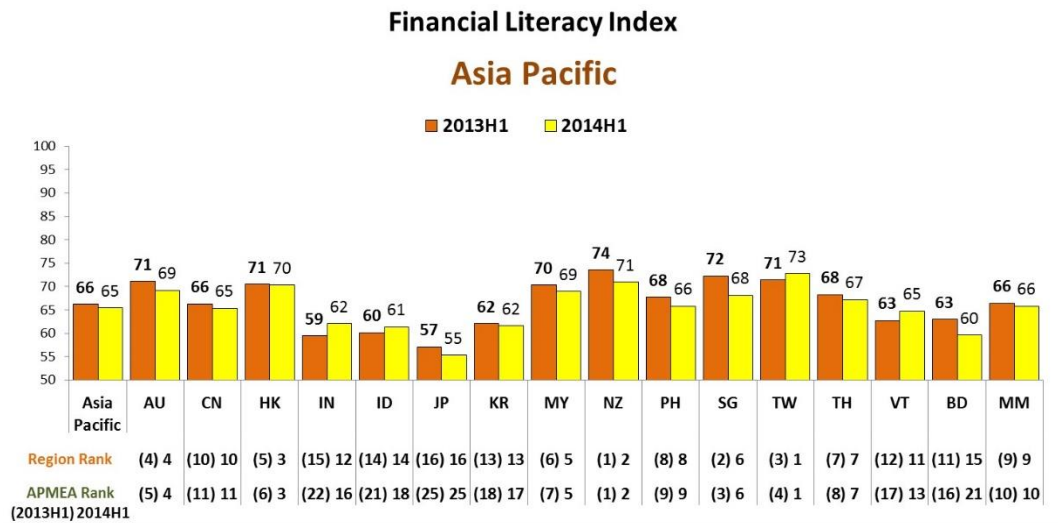
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini literasi keuangan di Indonesia menjadi salah satu perhatian penting Pemerintah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat literasi keuangan yang rendah dibandingkan dengan beberapa negara Asia Pasifik. Survei tingkat literasi keuangan Indonesia yang dilakukan oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan [OJK] pada 2017 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 tingkat literasi keuangan Indonesia sebesar 21,84% dan naik menjadi 29,66% pada tahun 2017. Selain itu, menurut Presiden ke-7 RI dalam acara pembukaan Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC), tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2013 masih tertinggal jauh dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Tingkat literasi keuangan masyarakat Malaysia sebesar 51%, Thailand 76% dan Singapura 96% (Supriatin, 2016).

Pada 2014 Indonesia termasuk negara dengan literasi keuangan tiga terendah di Asia Pasifik dengan indeks 61 pada peringkat 14 dari 16 negara di atas India dan Jepang menurut penelitian *Master Card* (2015). Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan literasi keuangan yang semakin tinggi. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan indeks literasi keuangan terendah di Asia Tenggara. Indeks literasi keuangan Indonesia berada di peringkat tujuh dari tujuh negara Asia Tenggara dengan indeks sebesar 60 pada tahun 2013 dan indeks 61 pada tahun 2014. Tingkat literasi keuangan Indonesia pada tahun 2013 terpaut 2 poin dengan negara Vietnam di peringkat 6 dan 4 poin pada 2014. Indeks literasi keuangan tertinggi dari tujuh negara Asia Tenggara adalah Singapura dengan indeks 72 pada 2013 dan indeks 68 pada 2014. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia masih jauh tertinggal dari tingkat literasi keuangan di beberapa negara Asia Tenggara.

Gambar 1. Indeks Literasi Keuangan Asia Pasifik



(Mastercard Financial Literacy Index, 2015).

Tabel 1. Indeks Literasi Keuangan Asia Tenggara

Negara	Kode Negara	2013	2014
Singapura	SG	72	68
Malaysia	MY	70	69
Thailand	TH	68	67
Filipina	PH	68	66
Myanmar	MM	66	66
Vietnam	VT	63	65
Indonesia	ID	60	61

(Mastercard Financial Literacy Index, 2015).

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Literasi keuangan yang baik merupakan pintu menuju kehidupan yang lebih baik (Keuangan Inklusi Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat, 2016). Menurut Vitt et al. (2002) literasi keuangan pribadi adalah:

“....the ability to read, analyze, manage, and communicate about the personal financial conditions that affect material well-being. It includes

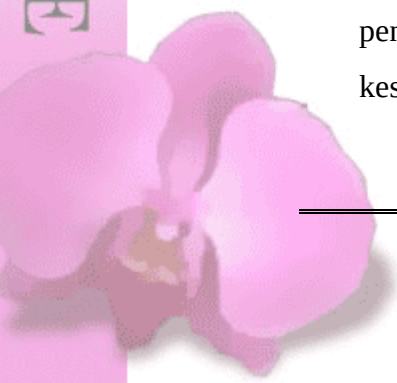
the ability to discern financial choices, discuss money and financial issues without (or despite) discomfort, plan for the future, and respond competently to life events that affect everyday financial decisions, including events in the general economy.”

Menurut Presiden ke-7 RI Indonesia literasi keuangan adalah langkah penting untuk dapat meningkatkan inklusi keuangan sebagai langkah melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial (Keuangan Inklusi Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat, 2016). Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengarahkan adanya percepatan literasi melalui beberapa arahan dan strategi kepada Kementerian, Lembaga dan Otoritas terkait. Langkah-langkah arahan tersebut antara lain dengan memperluas jangkauan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan formal dengan menyesuaikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan meningkatkan kapasitas yang belum memperoleh layanan keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan. Selain itu terobosan tersebut juga dengan memperkuat kebijakan yang mendukung keuangan inklusif seperti peningkatan akses layanan keuangan terutama bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah serta perlindungan konsumen yang menyangkut jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dan dalam memanfaatkan produk-produk layanan jasa keuangan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, 2016)

Peningkatan pemahaman literasi keuangan juga dilakukan melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diusung Presiden ke-7 Republik Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, 2016). Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Strategi ini menerapkan 6 pilar diantaranya edukasi keuangan

mengenai produk dan jasa keuangan, fasilitas keuangan publik salah satunya dengan pemberdayaan UMKM, pemetaan informasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam literasi keuangan, kebijakan/peraturan yang mendukung untuk meningkatkan akses layanan keuangan dan fasilitas intermediasi dan saluran distribusi produk dan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan menganut Trilogi Kebijakan pemberdayaan konsumen antara lain Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pengimplementasikan Trilogi Kebijakan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui edukasi keuangan (Prabowo, 2015). Edukasi keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (2016). Edukasi keuangan sangat penting untuk Indonesia guna meningkatkan perekonomian negara (Nidar dan Bestari, 2012). Menurut Kusumaningtuti S. Soetiono selaku Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, tingkat literasi keuangan yang tinggi dalam suatu negara cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ade F. N., 2016). Direktur Literasi Keuangan dan Pendidikan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Horas VM Tarihoran mengatakan bahwa perputaran uang yang disalurkan ke dalam perusahaan pembiayaan dan lainnya akan memberikan nilai tambah terhadap ekonomi sehingga masyarakat mendapatkan nilai tambah dari investasi yang dilakukan perusahaan keuangan akan meningkatkan kesejahteraan (Aryanto, 2016). Literasi keuangan merupakan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Pemahaman literasi keuangan yang baik serta adanya kesadaran mengenai pentingnya lembaga, produk dan layanan jasa keuangan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memilih serta memanfaatkan lembaga,



produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai kelompok kerja bidang edukasi meluncurkan buku Seri Literasi Keuangan tingkat Perguruan Tinggi sebagai bentuk penerapan dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) melalui pilar edukasi keuangan. Peluncuran Seri Literasi Keuangan diawali dengan pengeluaran buku literasi keuangan untuk sekolah dasar yang berjudul “Menenal Jasa Keuangan” dan buku berjudul “Menenal OJK dan Industri Jasa Keuangan”. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menggelar program *Training of Trainers* untuk dosen pada perguruan tinggi di berbagai kota di Indonesia agar memudahkan para dosen dalam mengajarkan materi buku literasi keuangan kepada mahasiswa. Edukasi keuangan juga diberikan kepada ibu rumah tangga, pekerja formal, pekerja informal dan pensiunan oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Penerbitan seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat atas berbagai sektor jasa keuangan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia (Nuraini, 2016).

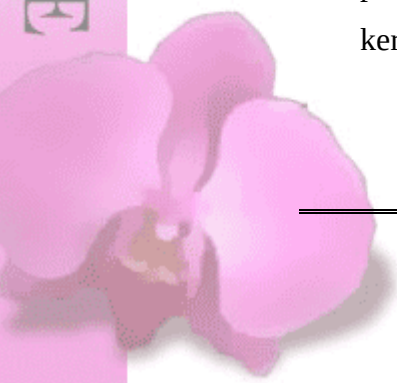
Berdasarkan data Kemenristek Dikti Republik Indonesia (2016), pada tahun ajaran 2015/2016 pendidikan di bidang ekonomi memiliki jumlah mahasiswa terbanyak dibanding bidang lain yaitu sebesar 1.132.200 mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) untuk menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dengan melalui berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang mereka miliki (Kurniawan, 2016). Seluruh civita akademik khususnya dalam bidang ekonomi diharapkan dapat memperoleh bekal wawasan dalam memahami konsep dasar dari berbagai produk keuangan, mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta menjadi pengguna produk dan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan (Nuraini, 2016).

Beberapa penelitian tentang literasi keuangan diuraikan di bawah ini. Chen dan Volpe (1998) mengemukakan bahwa pendidikan, demografi (gender), tingkatan mahasiswa (*class rank*), usia dan pengalaman kerja merupakan faktor yang menentukan literasi keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat literasi keuangan wanita lebih rendah daripada laki-laki. Hasil penelitian Nidar dan Bestari (2012) menunjukkan bahwa gender tidak memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan, mahasiswa tingkat pertama, di bawah usia 30, dan sedikit pengalaman kerja memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah. *Nababan dan Sadalia (dalam Margaretha dan Pambudhi, 2015) menemukan bahwa laki-laki memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi. Sementara itu, hasil penelitian Khrisna, Rofaida dan Sari (2010) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Selanjutnya anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan bahwa tingkat literasi perempuan Indonesia masih berada pada angka 19 persen atau lebih rendah dibandingkan pria yang mencapai 25 persen (Deny, 2014).*

Berdasarkan uraian permasalahan yang ditemukan di atas, dan adanya perbedaan faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan pribadi, maka penelitian tersebut perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini menguji tiga faktor yang diduga penyebab perbedaan tingkat literasi keuangan yaitu gender, IPK dan pengalaman kerja. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti “Literasi Keuangan Pribadi pada Mahasiswa STIE Malangkuçeçwara Malang Angkatan 2013”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh gender, IPK dan pengalaman kerja secara signifikan terhadap literasi keuangan?”



1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan adanya pengaruh gender, IPK dan pengalaman kerja secara signifikan terhadap literasi keuangan.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu manajemen keuangan.

